ABSTRAK

Pembicaraan berkaitan dengan kemunculan wanita dalam kancah perpolitikan merupakan pembicaraan yang hangat sejak masa dahulu sampai pada masa sekarang yaitu di era modern dan Demokrasi, dan bahkan mungkin akan terus diperdebatkan, terutama oleh mereka yang belum merasa puas dengan kondisi yang saat ini sedang berlangsung. Dengan banyak pembicaraan masalah ini tentu secara langsung atau tidak langsung akan bersinggungan dengan permasalahan wacana Islam kontemporer. Di masa lalu hamper setiap pemikir muslim selalu memiliki bahasan eksklusif tentang peranan wanita dalam politik, diantaranya adalah Mustapa As-Siba'i dan Fatimah Mernissi.

As-Siba'i mengatakan bahwa wanita tidak layak untuk berperanan dalam politik seperti di era modern dan demokrasi, wanita cukup berperanan sesuai dengan kodratnya yaitu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Peranan itu akan lebih mulia dibandingkan dengan berperan dalam bidang politik yang bukan wilayahnya dan mereka tidak mempunyai keahlian untuk itu. Beliau mendasarkan pendapatnya pada surat an-Nisa' ayat 34 dan hdist riwayat Imam al-Bukhari tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Sementara itu, menurut pandangan Fatimah Mernissi sebagai seorang feminis menyangkal pandangan yang ingin memasung kebebasan kaum wanita dalam bidang apapun terutama politik karena melalui politiklah kebebasan sejati itu dapat terwujud. Pemahaman dan penafsiran terhadap nash yang tekstual tentu menghasilkan sebuah kesimpulan yang berat sebelah, diskriminatif dan berimbas pada instabilitas dalam sebuah masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui istinbat hukum Mustafa as-Siba'i dan Fatima Marisi tentang kemunculan wanita dalam kancah politik, serta relevansi istinbat hukum kedua tokoh tersebut terhadap kemunculan wanita dalam politik.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penaafsiran As-Siba'i terhadap surat An-Nisa' ayat 34 menunjukkan bahwa metode istinbat hokum yang ia lakukan menggunakan metode dilalah alfaz (tunjukkan makna dari suatu kata), kata qawwamuna 'ala an-nisa' dalam ayat tersebut menjelaskan perempuan hanya bertugas mengurus urusan rumah tangga tidak lebih dari itu. Sedangkan Fatimah Mernissi, surat ali-Imran ayat 104 yang dijadikan landasan pemikirannya, menjelaskan bahwa peran politik tidak hanya menjadi wilayah laki-laki semata karena hal itu merupakan bagian dari tugas amar ma'ruf nahi munkar, hal ini menunjukkan bahwa istinbat hukum yang digunakan oleh Fatimah Mernissi adalah teori qiyas, integritas dan kualitas pribadi seoranglah yang menjadi ukuran dalam menilai apakah ia mampu atau tidak daalam mengemban jabatan politik. Peranan politk wanita di era modern dan demokrasi ini tidak dapat dipungkiri lagi, kebebasan dalam memperoleh dan memilih pendidikan merupakan salah satu faktor, wanita juga berhak menempati posisi dalam struktur pemerintahan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau